

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Elsye (2013) menyatakan bahwa desentralisasi keuangan atau yang lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal telah muncul sebagai wawasan baru dalam kebijakan negara pada era 1970-an. Desentralisasi keuangan di Indonesia baru dimulai pada tahun 1999 saat Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa daerah kabupaten dan kota diberikan kewenangan otonomi yang luas pada semua bidang pemerintahan kecuali bidang-bidang tertentu. Indonesia terus memperbarui kebijakan desentralisasi fiskal salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang secara spesifik mengembalikan peran pemerintah provinsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Saat ini undang-undang tersebut sudah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Konsep desentralisasi dalam otonomi daerah harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Pernyataan ini sesuai dengan yang disebutkan Saragih (2003)

dalam Elsy (2013) bahwa desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi suatu tugas pemerintahan dari pelayanan publik, artinya daerah-daerah harus mampu bertindak lokal namun berwawasan nasional. Transfer wewenang fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diwujudkan dengan transfer ke daerah dan dana desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019, transfer ke daerah memiliki 3 struktur yaitu dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan.

Salah satu dana transfer pusat yang menjadi sorotan para praktisi adalah Dana Insentif Daerah (DID). DID merupakan dana yang istimewa sebab dana ini hanya diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria tertentu yang dipersyaratkan pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 mendefinisikan Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID sebagai berikut:

DID adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Salah satu pemda kabupaten/kota di Provinsi Sumatera utara yang memperoleh DID adalah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Dana transfer dari pemerintah pusat ini diterima Pemda Tapsel sejak tahun 2016. Data DID Tapsel mulai tahun 2016 sampai tahun 2021 pada tabel I.1.

Tabel I.1 Alokasi DID Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021

Tahun	Alokasi DID (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
2016	5,00
2017	50,66
2018	8,00
2019	23,13
2020	52,03
2021	11,06

Sumber: Diolah dari DJPK (2021)

Kementerian Keuangan (2021) mengatur bahwa penggunaan DID pada tahun 2021 diutamakan untuk pelayanan digitalisasi bidang pendidikan dan kesehatan serta pemulihan ekonomi termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penggunaan DID di Tapsel untuk bidang pendidikan menjadi hal yang menarik untuk ditinjau karena ditemukan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapanuli selatan lebih rendah dibanding Kota Padangsidimpuan. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut (BPS, 2014). APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya (Amaliah, 2015). Data APM pada tahun 2020/2021 di Kabupaten Tapsel dan Kota Padangsidimpuan pada tabel I.2.

Tabel I.2 APM Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan

Kab./Kota	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Tapanuli Selatan	90,31	75,84	62,70
Padang Sidempuan	93,68	86,32	86,69

Sumber: Diolah dari Kemendikbud (2021)

Kabupaten Tapsel sudah menerima DID sejak tahun 2016. DID untuk bidang pendidikan diaokasikan mulai tahun 2019. *Outcome* dari pengalokasian DID ini salah satunya untuk meningkatkan nilai APM di Kabupaten Tapsel. Namun, APM Kab. Tapsel selaku penerima dana yang lebih banyak masih lebih rendah dibanding Kota Padang Sidempuan yang tidak menerima DID sama sekali.

Penggunaan DID untuk program Pemerintah Daerah Kab. Tapsel adalah hal yang penting mengingat nominal DID yang dialokasikan tidak sedikit. Bahkan tahun 2020 DID Tapsel adalah yang terbanyak se-Sumatera Utara. Oleh sebab itu perlu dikaji apakah penggunaan DID ini sudah sesuai kebijakan pada 160/PMK.07/2021, serta apakah *output* yang dihasilkan dari belanja DID ini dapat mendukung pencapaian kinerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapsel.

Penulis menguraikan dampak penggunaan DID 2019-2020 untuk bidang pendidikan di Kabupaten Tapsel dengan metode *logic model*. *Logic model* merupakan gambar visual logis suatu program yang menunjukkan rangkaian hubungan sebab-akibat antara *input*, aktivitas, *output*, dan *outcome* yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai respon atas permasalahan yang dihadapi pada saat ini (Akbar, 2018). Oleh sebab itu, *logic model* merupakan

metode yang tepat untuk melihat gambaran hasil dari program yang dilakukan pemerintah. Dengan adanya ketertarikan penulis akan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam sehingga dipilih judul: “PENGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH UNTUK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana profil program penggunaan DID untuk bidang pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dengan pendekatan *logic model*?
2. Bagaimana kendala dalam penggunaan DID untuk bidang pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui profil program penggunaan DID untuk bidang pendidikan dengan kerangka *logic model* di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan DID untuk bidang pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini berfokus pada DID di Kabupaten Tapanuli Selatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 yang ditinjau dari bidang pendidikan. Penelitian ini akan memaparkan profil program yang didanai dari DID pada bidang pendidikan dan kendala pada program tersebut. Penulisan karya tulis ini akan berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan data yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Kab. Tapsel dalam menyelesaikan permasalahan seputar penggunaan DID. KTTA ini diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi kendala penggunaan DID.

2. Manfaat Akademis

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan keilmuan dan penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat mengambil saran penulis terkait hal-hal yang menarik untuk diteliti pada BAB IV.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang disusun. Gambaran umum yang dimaksud terdiri atas latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori menguraikan teori-teori yang terkait dana insentif daerah dan *logic model*. Teori DID terdiri dari konsep dasar DID dan DID untuk bidang pendidikan. Teori *logic model* akan dikaitkan dengan pencapaian kinerja pada program pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Metode terdiri dari metode pengumpulan dan metode analisis data. Sedangkan bagian pembahasan membahas dari profil program penggunaan DID untuk bidang pendidikan dan kendala penggunaan DID untuk bidang pendidikan.

BAB IV SIMPULAN

Simpulan memuat mengenai kesimpulan terkait hal-hal yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran terhadap pembaca dan objek penelitian.